

Determinan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali**Yolanda Maretania¹****I Nyoman Mahaendra Yasa²****^{1,2}FakultasEkonomidanBisnisUniversitasUdayana (Unud), Bali, Indonesia****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten, investasi, dan konsumsi rumah tangga secara simultan dan parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Penelitian ini menggunakan data time series selama 8 tahun dari tahun 2015 hingga 2022 dan data cross section dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi data panel. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa model yang paling tepat adalah Fixed Effect Models (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten, investasi, dan konsumsi rumah tangga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Upah minimum kabupaten memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan investasi dan konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali..

Kata kunci: *kesejahteraan masyarakat, upah minimum kabupaten, investasi, konsumsi rumah tangga.*

ABSTRACT

The motive of this look at is to research the have an effect on of district minimal wages, funding, and family intake, each concurrently and in part, at the welfare of district/metropolis groups withinside the Province of Bali. The studies places have been performed in regencies/towns in Bali Province the use of secondary records that have been posted via way of means of the Bali Province Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The range of observations on this look at have been seventy two observations with eight years of time collection records from 2015-2022 and go segment records of nine regencies/towns in Bali Province. The records series technique on this look at changed into thru non-player remark techniques. The records used is a aggregate of time collection records and go segment records withinside the shape of panel records. The evaluation method used is descriptive evaluation and panel records regression. The panel records regression check consequences display that the maximum suitable version selected is the constant impact version (FEM). The consequences of the look at observed that district minimal wages, funding, and family intake concurrently have a great impact on people's welfare. District minimal wages have a fantastic and great impact, even as

funding and family intake have a fantastic however in part insignificant impact at the welfare of district/metropolis groups withinside the Province of Bali..

keyword: *community welfare, district minimum wage, investment, household consumption.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam melihat perkembangan suatu wilayah, dan negara Indonesia, sebagai negara berkembang, berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan standar hidup setiap individu, termasuk pendapatan, konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan juga diharapkan menciptakan pemerataan, keadilan, dan menghilangkan ketimpangan pembangunan antar daerah dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam.

Pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, fenomena ini menarik untuk diperhatikan berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Ayu et al. (2014) dan Irvan (2015), yang menyatakan bahwa setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM menggambarkan tiga dimensi utama kesejahteraan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

Pertumbuhan ekonomi per kapita dapat mengindikasikan daya beli individu. Ketika daya beli individu meningkat, kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga akan meningkat. Oleh karena itu, cara terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memaksimalkan pembangunan ekonomi.

Struktur ekonomi yang berubah dalam daerah yang relatif maju dapat berpengaruh terhadap pendapatan dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program pembangunan yang dirancang harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan hal penting dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai proses untuk memperluas pilihan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari segi daya beli, kesehatan, dan pendidikan.

Namun, pada awal tahun 2020, muncul pandemi COVID-19 yang telah memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pandemi ini menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi domestik, yang berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pembatasan pergerakan masyarakat yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 telah mempengaruhi pendapatan

Tabel 1. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2022 (poin)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jembrana	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35	72,36	72,75	73,58
Tabanan	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16	76,17	76,45	76,75
Badung	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59	81,60	81,83	82,13
Gianyar	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14	77,36	77,70	78,39
Klungkung	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71	71,73	71,75	72,55
Bangli	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35	69,36	69,37	70,26
Karangasem	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34	67,35	67,36	68,28
Buleleng	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30	72,55	72,56	73,45
Denpasar	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68	83,93	84,03	84,37
Provinsi Bali	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69	76,44

Sejak tahun 2015-2022 capaian IPM kabupaten/kota tertinggi yaitu Kota Denpasar, dari tahun ke tahun capaian IPM berada pada kisaran angka 82,24 poin sampai 84,37 poin masih di atas capaian Provinsi Bali, berbeda dengan Kabupaten Karangasem yaitu masih berkisar pada angka 64,68 poin sampai 68,28 poin yang berada di bawah Provinsi Bali. Perbedaan perolehan IPM dari kabupaten/kota tersebut menunjukkan bahwa adanya disparitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu pada empat kabupaten/kota seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan terdapat poin di atas atau lebih besar jika dibandingkan dengan poin Provinsi Bali dan juga adanya disparitas pada lima kabupaten/kota seperti Jembrana, Klungkung,

Bangli, Karangasem, dan Buleleng yang terdapat poin di bawah atau lebih kecil jika dibandingkan dengan poin Provinsi Bali. Menurut BPS, Provinsi Bali (2022), posisi Provinsi Bali terhadap nasional untuk IPM tahun 2019-2022 tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran IPM yang di tahun ini tercatat sebesar 76,44 atau tumbuh 0,99 persen (meningkat 0,75 poin) dibandingkan capaian tahun 2021.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah berupaya melakukan pembangunan di berbagai bidang dengan berbagai macam program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun belum berhasil secara maksimal mengurangi ketidakmerataan pembangunan. Diperlukan peninjauan kembali kebijakan strategis bagi kabupaten dengan capaian IPM yang relatif rendah agar kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat dipersempit. Menentukan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing sangat penting dilakukan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Cara alokasi sumber daya yang lebih seimbang yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia di daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien, dan pengembangan kelembagaan dan aparat daerah. Perkembangan IPM mencerminkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun demikian namun tinggi atau rendahnya tingkat IPM belum tentu mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan deskripsi masing-masing variabel, berikut disajikan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan nilai dari variabel dengan nilai rata-rata, maksimum, minimum dan standar deviasi. Berikut disajikan hasil analisis deskriptif pada Tabel 2.

Tabel 2. Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Upah Minimum Kabupaten	72	1622000.	29961285	2279320	357999.3
Investasi	72	3124.000	9533296.	1623014	2259276.
Konsumsi Rumah Tangga	72	628603.0	2247772.	1199634	411940.4
Kesejahteraan Masyarakat	72	64.68000	84.37000	74.10403	5.538863

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif data yang ditunjukkan pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa observasi sebanyak 72 pengamatan, didapatkan dari 9 sampel atau objek yaitu kabupaten/kota di Provinsi Bali dikalikan periode penelitian selama 8 tahun yaitu 2015-2022. Upah minimum kabupaten (X1) memiliki nilai minimal Rp.1.622.000. Nilai maksimal sebesar Rp.29.961.285 dan rata-rata sebesar Rp.2.279.320 dengan standar deviasi sebesar Rp.3.579.993. Investasi (X2) memiliki nilai minimal sebesar 3.124.000 juta rupiah. Nilai maksimal sebesar 9.533.296 juta rupiah dan rata-rata sebesar 1.623.014 juta rupiah dengan standar deviasi sebesar 2.259.276 juta rupiah. Konsumsi rumah tangga (X3) memiliki nilai minimal Rp.628603.0. Nilai maksimal sebesar Rp.2247772 dan rata-rata sebesar Rp.1199634 dengan standar deviasi sebesar Rp.411940.4. Kesejahteraan masyarakat (Y) memiliki nilai minimal 64.68000 poin. Nilai maksimal sebesar 84.37000 poin dan nilai rata-rata sebesar 74.10403 poin dengan standar deviasi sebesar 5.538863 poin.

Tabel 3. Uji t

Variabel Independen	Nilai Signifikan	Kriteria Pengujian
Upah Minimum Kabupaten	0.0000 < 0,05	Signifikan
Investasi	0.9304 > 0,05	Tidak Signifikan
Konsumsi Rumah Tangga	0.1825 > 0,05	Tidak Signifikan

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien upah minimum kabupaten (X1) sebesar 0,000000258 bernilai positif. Nilai signifikansi $0.0000 < 0,05$ dan nilai t-hitung $> t$ -tabel ($12,26826 > 1,667$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien investasi (X2) sebesar 0,000000232 bernilai positif. Nilai signifikansi $0.9304 > 0,05$ dan nilai t-hitung $< t$ -tabel ($0,087678 < 1,667$) sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil uji t menunjukkan nilai koefisien konsumsi rumah tangga (X3) sebesar 0,000000535 bernilai positif. Nilai signifikansi $0.1825 > 0,05$ dan nilai t-hitung $< t$ -tabel ($1,348856 < 1,667$) sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat

Tabel 4. Uji F

Variabel Independen	Nilai Signifikan	Kriteria Pengujian
Upah Minimum Kabupaten	0.0000 < 0,05	Signifikan
Investasi	0.9304 > 0,05	Tidak Signifikan
Konsumsi Rumah Tangga	0.1825 > 0,05	Tidak Signifikan

Hasil output Eviews yang diberikan menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat kecocokan yang tinggi (R-square sebesar 0.995470). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Upah Minimum

Kabupaten, Investasi, dan Konsumsi Rumah Tangga secara bersama-sama secara signifikan menjelaskan variasi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode tahun 2015-2022. Selain itu, nilai F-hitung yang besar (1198.614) melebihi nilai F-tabel (2,740) dengan tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel Upah Minimum Kabupaten, Investasi, dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, penolakan hipotesis nol (H_0) dan penerimaan hipotesis alternatif (H_1) menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (X1), Investasi (X2), dan Konsumsi Rumah Tangga (X3) Secara Simultan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Berdasarkan hasil analisis data secara simultan variabel upah minimum kabupaten, investasi, dan konsumsi rumah tangga, berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berarti variabel upah minimum kabupaten, investasi, dan konsumsi rumah tangga berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa meningkatnya pendapatan upah minimum kabupaten suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Adam Smith (1776) (Mankiw, 2000:118), menganalisis apa yang menyebabkan standar hidup meningkat dan menunjukkan bagaimana kepentingan diri dan persaingan berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat yaitu yang diperoleh dari tingkat upah. Kondisi ini disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan upah minimum kabupaten akan meningkatkan standar hidup masyarakat dengan mendorong jumlah pengeluaran kebutuhan yang akan akan dikonsumsi masyarakat. Jumlah konsumsi rumah tangga yang dikeluarkan masyarakat dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat, maka kesejahteraannya pun akan menurun. Konsumsi secara langsung sangat berguna untuk kesejahteraan ekonomi karena pendapatan dan konsumsi dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang. Dapat disimpulkan bahwa tingkat konsumsi yang dikeluarkan masyarakat, akan berdampak pada bertambah besarnya pendapatan yang harus diperoleh masyarakat.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (X1), Investasi (X2), dan Konsumsi Rumah Tangga (X3) Secara Parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kondisi ini disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan upah minimum kabupaten akan meningkatkan standar hidup masyarakat dengan mendorong jumlah pengeluaran kebutuhan yang akan akan dikonsumsi masyarakat. Upah minimum kabupaten memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Upah minimum bertindak sebagai intervensi dalam mekanisme pasar dengan menetapkan nilai dasar di atas tingkat keseimbangan. Ini memberikan perlindungan bagi pekerja untuk mempertahankan nilai upah mereka agar tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penerapan upah minimum juga melindungi perusahaan dengan menjaga produktivitas pekerja. Penelitian telah menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang sesuai dengan upah minimum memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi seperti konsumsi, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, ada beberapa kendala dalam penerapan upah minimum, seperti perusahaan kecil yang sulit menerapkannya dan kurangnya komitmen perusahaan terhadap pemberian upah sesuai ketentuan. Penting untuk memantau dan menegakkan penerapan upah minimum dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi pekerja dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, perlu diingat bahwa upah minimum hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Faktor lain seperti investasi, konsumsi, akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan investasi tidak mendatangkan pendapatan pada masyarakat, karena investasi bersifat padat modal dan bukan padat karya (Capital Intensity) yang mengakibatkan sedikitnya penyerapan pada tenaga kerja, sehingga untuk kedepannya sebaiknya investasi lebih banyak

menyerap tenaga kerja yang bersifat padat karya dan dikarenakan adanya disparitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Semakin kecil nilai ICOR, semakin efisien perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu. Berdasarkan data statistik kabupaten/kota di Provinsi Bali selama lima tahun dari tahun 2018-2022 tercatat pada kisaran 5,59 hingga 6,57. Angka ini mengandung arti untuk mencapai penambahan output sebesar 1 unit, dibutuhkan penambahan sebanyak 5,59 kali unit capital di tahun 2018 dan kebutuhan tersebut meningkat menjadi 6,57 pada tahun 2022. Kondisi ini tentu bukan merupakan gambaran positif karena secara tidak langsung menunjukkan ekonomi Bali semakin tidak efisien (membutuhkan capital yang semakin banyak untuk menciptakan 1 output). Pada tahun 2021 terjadi kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, besaran ICOR pada tahun ini tercatat sebesar -12,26. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan nilai tambah yang tercipta selama tahun 2021. Investasi yang tercatat di tahun 2021 belum mampu untuk meningkatkan nilai tambah yang tercipta di tahun tersebut.

Perkembangan pesat teknologi pada era revolusi 4.0 memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi. Meskipun teknologi membawa kemudahan dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan, tetapi kehadirannya juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya penggantian manusia dalam beberapa bidang pekerjaan oleh teknologi. Automasi dan kecerdasan buatan telah menggantikan beberapa tugas manusia dalam berbagai sektor, bahkan di dunia industri proses produksi sudah banyak yang dilakukan oleh robot.

Penggunaan teknologi dalam otomatisasi pekerjaan seperti pemindahan barang dan packing telah mengurangi keterlibatan manusia dalam proses tersebut. Dalam jangka panjang, perkembangan teknologi bisa mengakibatkan penggantian tenaga kerja manusia oleh teknologi baru, yang berpotensi menyebabkan penurunan lapangan kerja yang membutuhkan tenaga manusia. Meskipun ada dampak negatif tersebut, penting untuk diingat bahwa perkembangan teknologi juga membuka peluang baru dalam menciptakan pekerjaan baru. Terdapat kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dalam mengelola dan mengembangkan teknologi, serta dalam

bidang-bidang yang membutuhkan interaksi manusia yang sulit digantikan oleh mesin, seperti pelayanan pelanggan, kreativitas, dan kepemimpinan.

Oleh karena itu, sambil mengakui potensi penggantian pekerjaan oleh teknologi, penting bagi masyarakat untuk terus mengembangkan keterampilan yang relevan dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi. Pendidikan dan pelatihan menjadi kunci dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi perubahan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, serta menciptakan kebijakan yang mendukung transisi yang adil bagi pekerja yang terkena dampak penggantian teknologi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, pada tahun 2015-2022 penanaman modal dalam negeri maupun modal asing cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Perkembangan investasi berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) terbesar berada di Kabupaten Badung pada tahun 2022 yakni sebesar 3.170.567 juta rupiah dan terkecil berada di Kabupaten Bangli yakni sebesar 20.970 juta rupiah. PMA terbesar tahun 2022 berada di Kabupaten Badung sebesar 3.238.136 juta rupiah dan terkecil berada di Kabupaten Bangli sebesar 8.597 juta rupiah. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena investor lebih memilih menanamkan modalnya pada satu daerah yang memiliki sektor potensial yang menjanjikan dan rasio keuntungan lebih besar. Kabupaten Badung memiliki beberapa keunggulan yang menjadikan nilai investasinya tertinggi, salah satunya karena banyaknya pembangunan infrastruktur, sehingga lebih menarik para investor.

Konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan tidak terjadi multiplier karena yang dikonsumsi masyarakat mengalir keluar (*capital flight*), yang seharusnya apabila pengeluaran konsumsi meningkat, seharusnya lebih banyak digunakan untuk barang-barang diluar kebutuhan tersebut seperti non makanan, sehingga menyebabkan tidaknya signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Contohnya pada saat pandemi Covid-19 masyarakat mendapat bantuan dana dari pemerintah guna membantu masyarakat untuk bertahan hidup mencukupi kebutuhannya, namun beberapa masyarakat membelanjakan barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya selain makanan. Oleh karena itu, terutama bagaimana menciptakan produk-produk dengan kualitas yang standart / yang

bersaing dengan barang-barang impor. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori konsumsi rumah tangga menurut Keynes (1930),

Simpulan

Upah minimum kabupaten, investasi, dan konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil ini memberikan makna bahwa secara simultan variabel upah minimum kabupaten, investasi, dan konsumsi rumah tangga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan investasi, dan konsumsi rumah tangga berpengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Diantara ketiga variabel independen yaitu upah minimum kabupaten, investasi, dan konsumsi rumah tangga, yang berpengaruh dominan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah upah minimum kabupaten.

Saran

Upah minimum kabupaten sangat penting. Investasi bersifat padat modal dan bukan padat karya (Capital Intensity) yang mengakibatkan sedikitnya penyerapan pada tenaga kerja, sehingga untuk kedepannya sebaiknya investasi lebih banyak menyerap tenaga kerja yang bersifat padat karya dan dikarenakan adanya disparitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta upaya meningkatkan efisiensi melalui teknologi, sehingga diharapkan ICOR dapat lebih kecil. Hal ini dikarenakan ICOR menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil nilai ICOR, semakin efisien perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu. Konsumsi masyarakat mengalir keluar (capital flight), yang seharusnya apabila pengeluaran konsumsi meningkat, maka seharusnya lebih banyak digunakan untuk barang-barang diluar kebutuhan tersebut seperti non makanan, sehingga menyebabkan tidaknya signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Contohnya pada saat pandemi Covid-19 masyarakat mendapat bantuan dana dari pemerintah guna membantu masyarakat untuk bertahan hidup mencukupi kebutuhannya, namun beberapa masyarakat membelanjakan barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya selain makanan. Oleh karena itu, terutama bagaimana menciptakan produk-produk dengan kualitas yang standart / yang bersaing dengan barang-barang impor.

REFERENSI

- Abu Bakar. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*. Vol 4 No. 2. ISSN 2579-7875.
- Agus Widarjono. (2005). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. JEP. Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Ain', N. (2021). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 162- 169.
- Amanaturrohim, H., & Widodo, J. (2016). Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Kopi di Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung. *Economic Education Analysis Journal*. 5(2), 468-479.
- Amirul Zamharir. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum Terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium di Indonesia. *E- Jurnal Ekonomi Universitas Airlangga*, 2 (1), hal. 42-43.
- Arifin, M dan P. Simatupang. (1988). Pola Konsumsi dan Kecukupan Kalori dan Protein di Pedesaan Sumatera Barat dalam Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitin Agro Ekonomi.
- Arifin Taslim. (2004). *Motode Kesejahteraan Masyarakat*. IPB. Bogor.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan edisi 5*. Yogyakarta: Bagian penerbit STIM YKPN.
- Asyian, Sri. (2013). Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol.1, No.3, Hal: 1-18.
- Attanasio, Orazio P., dan Luigi, Pistafferi. (2016). Consumption Inequality. *Journal Of Economic Perspectives*. Vol. 30, No. 2, pp. 3-28.
- Atiyantna, Dirta Pratama, Nurlina T. Muhyidin Dan Bambang Bemby Soebyakto. (2016). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 14 (1): 8-21.
- Ayu Putri Wahyuni, I Gusti; Made Sukarsa dan Nyoman Yuliarmi. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 3(8): 458-477.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2015-2022*. BPS Bali. Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brown, A.J.G., Merkl, C. & Snower DJ. (2014). The Minimum Wage From a Two- Sided Perspective. *Economics Letters*, Vol 12 No 3, p.389-391.

Determinan Kesejahteraan Masyarakat.....[Yolanda Maretania, I Nyoman Mahaendra Yasa]

- Darsono. (2006). Karl Marx–Ekonomi, Politik, dan Aksi Revolusi, Jakarta: Diadit Media.
- Dita, Sekar Ayu. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. E-Jurnal Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 23 (1), hal. 9-10.
- Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Duesenberry, James S. (1949). Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dornbusch, Rudiger & Fischer. (2004). Macro Economics (9th ed). Mc Graw – Hill Companies. New York.